

PENGELOLAAN KAS (APBD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sugesti, Meyzi Heriyanto dan Febri Yuliani

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Kampus Bina Widya KM 12,5 Simpang Panam – Pekanbaru

Abstract: Cash Management (APBD) at the Regional Financial and Asset Management Agency. This type of research is qualitative. This study aims to find out and analyze Cash (APBD) carried out by the Regional Asset Management and Asset Management Agency (BPKAD) of Rokan Hulu Regency as well as existing obstacles in cash management (APBD). The informants in this study were the head of the Regional Asset and Financial Management Agency of Rokan Hulu Regency, Secretary, Budget Head, Treasury Head and other informants related to the problems under study. Data obtained by conducting interviews, observation and documentation. The method used is descriptive with a qualitative approach by analyzing data through procedures for data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that overall cash management (APBD) in the Rokan Hulu District Government managed its regional finances including 5 indicators, namely Accountability, Value for money, Honesty in managing public finances (Probity), Transparency and Control were fairly good.

Keywords: accountability, value for money, probity, transparency

Abstrak: Pengelolaan Kas (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kas (APBD) yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu serta hambatan yang ada dalam pengelolaan Kas (APBD). Informan pada penelitian ini yaitu kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Sekretaris, Kabid Anggaran, Kabid Perbendaharaan dan informan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data melalui prosedur reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan kas (APBD) di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengelola keuangan daerahnya mencakup 5 indikator yaitu Akuntabilitas, Value for money, Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*Probity*), Transparansi dan Pengendalian sudah terbilang cukup baik.

Kata kunci: akuntabilitas, value for money, probity, transparansi

PENDAHULUAN

Secara umum tujuan didirikannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu adalah untuk dapat mewujudkan sumber daya aparatur daerah yang profesional, berwawasan manajemen keuangan yang sistematis, efisien dan efektif. Dalam aktivitasnya untuk menjalankan operasi instansi ada beberapa faktor mutlak yang dibutuhkan, adapun faktor-faktor tersebut antara lain modal, tenaga kerja dan aktivitas lainnya.

Fakta yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran daerah rela-

tif lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu pengeluaran daerah terus meningkat, sehingga hal tersebut meningkatkan *fiscal gap*. Keadaan ini pada akhirnya akan menimbulkan *under-financing* atau *overfinancing* yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas unit kerja Pemerintah Daerah.

Contoh pengelolaan kas yang tidak sesuai dilakukan adalah perencanaan yang tidak matang, tidak tepat sasaran, dan pelaksanaan dari program/kegiatan yang tidak berdasarkan prioritas, serta peran masyarakat yang masih kurang mengontrol pemerintah daerah akan menimbulkan pemborosan anggaran dan dampak tidak baik demi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan pembangunan yang jauh dari tujuan. Sementara kemampuan peningkatan keuangan dari sisi PAD sangat memprihatinkan dan harus dikelola dengan baik. Demikian juga halnya dengan pengeluaran atau belanja daerah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pengelolaan kas APBD oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Menurut Mamesah (dalam Halim 2004), keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”.

Menurut Halim (2004). Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Devas dkk. (1987) tujuan utama pengelolaan keuangan daerah

adalah: (1) tanggung jawab, (2) memenuhi kewajiban keuangan, (3) kejujuran, (4) hasil guna dan daya guna, dan (5) pengendalian.

Menurut Mamesah (1995) perhitungan anggaran (perhitungan APBD) merupakan pertanggung jawaban pemerintah atas seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD.

Keuangan negara merupakan urat nadi pemerintahan selaku organ yang bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan sebuah negara. Menurut Djandra (2006) keuangan Negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang. Keuangan Negara ditetapkan setiap tahunnya melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Menurut Admadja (2009) pada Persetujuan DPR atas APBN yang diusulkan pemerintah pada dasarnya adalah *machtiging* bukan hanya sebagai *consent* dari DPR kepada Pemerintah.

Anggaran adalah perhitungan jumlah dari pengeluaran negara yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan per periode kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya Tony Byrne dalam Rinusu dan Sri (2003) mengatakan bahwa anggaran adalah suatu pernyataan yang berisi rincian penerimaan dan belanja operasional maupun belanja modal, bersama dengan rencana untuk tahun yang akan datang.

Pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010) Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi:

1. Akuntabilitas;
2. Value for Money;
3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity);
4. Transparansi; dan

5. Pengendalian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Kas (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah informan kunci dan informan biasa yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, dan pegawai serta Kepala Dinas DPD Kabupaten Rokan Hulu. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui prosedur mulai dari reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan

HASIL

Akuntabilitas

Dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan rencana penganggaran kas (APBD) dan penganggaran harus disesuaikan dengan jumlah kas yang dibutuhkan.

“Akuntabilitas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu terbilang baik, terlihat pertanggungjawaban atas proses pengelolaan keuangan daerahnya kepada publik dengan adanya Surat Pertanggung jawaban (SPJ) dalam mengelola keuangan daerahnya, Terkait akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tupoksinya terlihat akuntabel dengan adanya pertanggung jawaban setiap kegiatan yang dilakukan lewat SPJ (Surat Pertanggung jawaban).”

Berdasarkan keterangan di atas dan pengamatan peneliti pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran seperti yang dijelaskan di atas memiliki kelemahan dimana para Kasi Belanja dan pembantu kasi belanja telah membuat rencana kebutuhan sesuai dengan kebutuhan.

Value For Money

Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, dikatakan efektif jika rasio yang dicapai sama dengan 1 atau 100%.

“Mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan atau transfer dari pusat maupun provinsi dan lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengoptimalkan PAD khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, selain itu juga melalui penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan berkompeten dalam pengelolaan keuangan daerah agar APBD dikelola secara baik dan tidak terjadi kebocoran anggaran atau pemborosan dalam belanja daerah”. (Wawancara; Hj. Romis Maidar, SE)

Kejujuran Dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah.

“Kejujuran dalam mengelola keuangan publik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu terbilang baik, terlihat dengan adanya rata-rata SDM di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu yang baik, sehingga seorang pegawai jujur dalam melaksanakan tupoksinya. SDM yang baik membuat seorang pegawai menjadi independen, objektif, berintegritas tinggi, dan dapat menjaga kerahasiaan dalam menge-

lola keuangan publik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu objektif dalam mengelola keuangannya, (Wawancara; Abdul Rohim, SE)

Transparansi

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan).

“Transparansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu terbilang baik, terlihat dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu melakukan komunikasi dengan publik dan memberikan hak akses terhadap masyarakat terkait transparansi proses pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, (Wawancara; Bapak Jaharuddin, SP, MM).

Pengendalian

Kutipan wawancara dengan Ibu Sri Desnilawati, SE, M.Si, Ak selaku Kasi Pembukuan dan Akuntansi, tentang kegiatan pengendalian dan monitoring pelaksanaan pengelolaan Kas (APBD), beliau mengatakan bahwa:

“Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengendalian dengan memonitoring penerimaan dan pengeluaran daerah dengan penggunaan SIMDA, langkah ini terbilang baik, karena segala proses kegiatan Keuangan Daerah dapat dimonitoring, dari pelaksanaan penggunaan SIMDA pengendalian dapat dilakukan di dalamnya. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dapat di monitoring lewat aplikasi SIMDA.

Wawancara; Ibu Sri Desnilawati, SE, M.Si, Ak

PEMBAHASAN

Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk menjamin ketersediaan dana pada saat dibutuhkan, sehingga pelaksanaan program/kegiatan yang manfaatnya akan dirasakan dan berdampak pada pelayanan publik dan pemerintahan dapat ber-

jalan lancar seperti yang direncanakan, sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan target kinerja.

Penyusunan anggaran kas (APBD) bagi pemerintah daerah berguna untuk mengetahui keadaan kas (APBD) yang ada secara lebih pasti, apakah surplus atau defisit. Jika surplus dapat memanfaatkan surplus tersebut dan jika defisit dapat memperkirakan sumber penutupan defisit.

Pelaksanaan anggaran kas pada pemerintah daerah membutuhkan informasi-informasi diantaranya:

1. Saldo arus kas yang merupakan kas pada awal tahun anggaran yang juga saldo akhir dari tahun anggaran sebelumnya, saldo ini juga merupakan Silpa;
2. Proyeksi penerimaan kas yang didasarkan pada jumlah penerimaan tahun sebelumnya secara *time series* serta memprediksi kemungkinan meningkatnya jumlah penerimaan dari pos-pos tertentu; dan
3. Proyeksi pengeluaran yang didasarkan pada jumlah pengeluaran tahun sebelumnya secara *time series* serta memprediksi kemungkinan meningkatnya jumlah pengeluaran dari pos-pos tertentu.

Tugas pelaksanaan pengelolaan kas (APBD) daerah adalah fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu yang pelaksanaannya fungsinya tersebut dilaksanakan setelah APBD disahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dalam struktur keorganisasiannya pelaksanaan pengelolaan kas (APBD) merupakan bagian tugas pokok dan fungsi bidang perbendaharaan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu memberikan persentase didalam rangka penyusunan anggaran kasnya ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Anggaran kas ini lah yang menjadi rambu-rambu bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu untuk mencairkan uang, tentu berhubungan

dengan tingkat realisasi pendapatan yang sekarang ini disusun oleh Bapenda. Rancangannya dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan hasil musrenbang, kemudian di proses dan diolah oleh bidang anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan penerimaan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan DPA satuan kerja perangkat daerah pada semua SKPD.

Manajemen kas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Manajemen kas merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh unit perbendaharaan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan tentang aliran kas daerah. Agar secara optimal dapat mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, pengelolaan kas (APBD) selayaknya dilaksanakan secara terencana, transparan dan akuntabel. Hal ini bermakna bahwa strategi pemerintah daerah untuk memaksimalkan hasil dari uang yang dimilikinya merupakan esensi utama dari manajemen kas. Pemerintah daerah kemudian membentuk suatu unit kerja yang melaksanakan fungsi perbendaharaan, yang mencakup perencanaan, penerimaan, penatausahaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban kas daerah, yang disebut dengan nama bendahara daerah. Dalam peraturan perundang-undangan terbaru dikenal dengan nama Bendahara Umum Daerah (BUD).

SIMPULAN

Secara keseluruhan pengelolaan kas (APBD) di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengelola keuangan daerahnya mencakup 5 indikator yaitu Akuntabilitas, Value for money, Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (Probity), Transparansi dan Pengendalian sudah terbilang cukup baik.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang

baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu objektif dalam mengelola keuangannya, sehingga anggaran yang nantinya akan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu terlihat independen karena pegawai menjalankan tupoksi dalam mengelola anggaran sudah ditatausahakan di bidangnya sehingga tidak ada intervensi atau tekanan dari luar.

DAFTAR RUJUKAN

- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : Fokusmedia
- Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta, Salemba Empat.
- Devas, Nick. 1987. *Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Indonesia (UIPress). Jakarta
- Djandra, W. Riawan, 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta, PT Grasindo.
- Halim. Abdul (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mamesah.D.J.1995, *Sistem Adiministrasi Keuangan Daerah*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rinusu dan Sri Mastuti. 2003. *Panduan Praktis Mengontrol APBD*. Jakarta, FES.
- Suhanda, 2007. *Akutansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang, Andalas Lima.